

## PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PERWUJUDAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE

Yovi<sup>1</sup>, Nina Yulianasari<sup>2</sup>, Iwin Arnova<sup>3</sup>

Universitas Prof.Dr.Hazairin,SH

e-mail: [yovibkl052@gmail.com](mailto:yovibkl052@gmail.com)<sup>1</sup>, [ninayulianasari26@gmail.com](mailto:ninayulianasari26@gmail.com)<sup>2</sup>, [iwinarnova89@gmail.com](mailto:iwinarnova89@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap perwujudan good village governance pada desa-desa di Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur desa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap good village governance. Demikian pula, kualitas sumber daya manusia memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa yang baik. Secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dan pengembangan kapasitas aparatur desa guna menciptakan tata kelola yang efektif dan berintegritas.

**Kata Kunci:** Audit Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, Good Village Governance, Pemerintahan Desa, Merigi Kelindang.

*Abstract* – This research aims to analyze the influence of internal audit and the quality of human resources on the realization of good village governance in villages located in Merigi Kelindang District, Central Bengkulu Regency. The study employed a quantitative approach with a survey method using questionnaires distributed to village officials. The collected data were analyzed using multiple linear regression. The findings indicate that internal audit has a positive and significant influence on good village governance. Similarly, the quality of human resources also has a positive and significant effect on effective village administration. Simultaneously, both variables contribute significantly to fostering transparency, accountability, and community participation in village governance. This study highlights the importance of strengthening internal control systems and improving the capacity of village officials to achieve effective and ethical governance.

**Keywords:** Internal Audit, Human Resources Quality, Good Village Governance, Village Administration, Merigi Kelindang.

### PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik (Bramantyo, 2022) cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.

Desa memiliki peran strategis di bidang pelayanan publik, seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, pembangunan infrastruktur, dan juga berbagai hal yang dapat meningkatkan pembangunan serta kemajuan suatu desa. Salah satu bukti untuk melihat adanya kemajuan suatu desa yaitu dengan adanya perwujudan good village governance. (Fauzi et al., 2023) Teori menyatakan perwujudan Good Village Governance dalam pengelolaan keuangan desa melalui prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Tidak dipungkiri bahwa kebijakan pembangunan desa secara nasional sudah berjalan dan terdapat perubahan yang

cukup signifikan, tetapi masih saja ada beberapa tantangan dalam implementasinya, mulai dari aktor para pelaku kebijakan sampai capaian program yang dilaksanakan di desa. Padahal tujuan dari fungsi manajemen pengawasan, khususnya pengawasan eksternal adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) (Aminudin, 2019).

*Good village governance* merupakan tata kelola desa yang baik dan merupakan acuan yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola keuangan desa. Menurut (Heriyanto, 2015) *Good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Ada pula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan yang baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan *public good and services*. Tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak (negara, masyarakat madani dan sektor swasta).

Audit internal adalah aktivitas assurance dan konsultasi yang independen serta objektif yang direncanakan untuk memberikan nilai tambah juga menaikan aktivitas operasi pada organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang teratur dan urut untuk menilai serta meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses *governance* (Wowointana, 2017). Audit internal memiliki kontribusi penting terhadap perwujudan *good village governance*. Proses pelaksanaan audit internal penting dilakukan guna memastikan akuntabilitas pemerintah desa. Auditor internal desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut hasil penelitian (Wowointana, 2017) bahwa kegunaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara preventif yakni kepengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk proses mencegah terjadinya penyimpangan sesuai dari fungsi Badan Permusyawaratan (BPD) itu sendiri.

Selain audit internal, faktor lainnya yang dapat digunakan untuk mewujudkan *good village governance* adalah kualitas sumber daya manusia. Perwujudan *good village governance* tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dianggap penting karena manusia berkualitas kaya akan keterampilan, kemampuan dan pengetahuan yang memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja. Sehingga hal ini berdampak pada perwujudan *good village governance*. Kualitas sumber daya manusia perlu dikembangkan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan tantangan baik di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Pada dasarnya, pengembangan sumber daya manusia merupakan peningkatan kinerja karyawan dalam bentuk prestasi. Adanya pengembangan sumber daya manusia, diharapkan anggota organisasi dapat bekerja dengan produktif dan berkinerja tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengukur keberlangsungan hidup suatu organisasi. Manusia merupakan asset paling menentukan keberhasilan pada sebuah organisasi. Kenyataannya saat ini masih banyak organisasi yang harus menghadapi permasalahan serius terkait kualitas sumber daya manusia. Contohnya seperti kesalahan yang terjadi baik pada segi manajemen maupun operasional yang mengakibatkan produktifitas organisasi tersebut menurun (Kelejan et al., 2018).

Perwujudan *good village governance* menjadi syarat mutlak guna mewujudkan aspirasi masyarakat demi mencapai tujuan bangsa dan negara. *Good village governance* adalah sebuah konsep yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa. Ada tiga elemen yang saling terkait untuk mencapai pemerintahan yang baik, diantaranya: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi diperlukan untuk dijadikan sebagai akuntabilitas mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil untuk dilaksanakan. Transparansi juga dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat sebagai pemberi masukan dan dorongan serta kontrol pada jalannya pemerintah desa. Jika ketiga elemen tersebut dijalankan secara maksimal, maka *good village*

governance akan terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelaksanaan good village governance terletak pada UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Kebijakan utama dari UU mengenai Desa tersebut salah satunya adalah peningkatan dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2014 mengenai Dana Desa, dana desa yakni dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa. Dana desa disalurkan lewat Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) (Wardani, 2019).

Dana desa diarahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa untuk mendanai kegiatan operasional pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan proses membina serta pemberdayaan warga desa. Dana desa termasuk dalam kategori sumber pendapatan desa. Dan pencatatan dana desa harus masuk pada laporan APBDes (Anggaran Pendapatan serta Belanja Desa).

Wilayah Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah. Kecamatan Merigi Kelintang, Kabupaten Bengkulu Tengah, terdapat beberapa fenomena menarik yang mencerminkan tantangan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Salah satu fenomena utama adalah adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa, dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Banyak warga desa yang merasa kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran dan program-program pembangunan. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak aparatur desa yang masih belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan program-program pembangunan. Ketidakmampuan ini seringkali menghambat efektivitas pelaksanaan program desa, yang pada gilirannya berdampak pada pencapaian tujuan good village governance. Sehingga, peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Fenomena lain yang menarik untuk dicermati adalah adanya praktik-praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran meskipun tidak selalu terlihat, kerap mencuat dan menjadi sorotan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya audit internal yang lebih ketat untuk mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh Desa Sekecamatan Merigi Kelintang, penelitian mengenai pengaruh audit internal dan kualitas SDM terhadap GVG di desa ini menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi yang bermanfaat bagi pengembangan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Guna mengatasi permasalahan kasus diatas maka dapat dicegah dengan memperkuat pelaksanaan audit internal. Audit internal adalah aktivitas assurance dan konsultasi yang independen serta objektif yang direncanakan untuk memberikan nilai tambah juga menaikan aktivitas operasi pada organisasi. Audit internal memiliki kontribusi penting terhadap perwujudan good village governance. Proses pelaksanaan audit internal penting dilakukan guna memastikan akuntabilitas pemerintah desa. Auditor internal desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut hasil penelitian Wawointana (2017) bahwa kegunaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara preventif yakni kepengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk proses mencegah terjadinya penyimpangan sesuai dari fungsi Badan Permusyawaratan (BPD) itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Audit Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Perwujudan Good Village Governance (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal, dimana terjadi hubungan sebab akibat diantara dua variabel yaitu, variabel dependen dan variabel independen. Desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel atau berguna untuk menganalisis bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan audit internal dan kualitas sumber daya manusia sebagai variabel independen terhadap peranan GVG sebagai variabel dependen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengangkat dua variabel utama, yaitu audit internal dan kualitas sumber daya manusia, dalam kaitannya terhadap perwujudan good village governance di desa-desa Kecamatan Merigi Kelindang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh kedua variabel tersebut terhadap praktik tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, ditemukan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hasil t hitung yang mencapai 30.181 dan nilai signifikansi 0.000 mendukung hipotesis ini.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketika fungsi audit internal dijalankan secara efektif, maka prinsip good village governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi akan lebih mudah diwujudkan di tingkat desa.

Audit internal dianggap sebagai alat pengawasan yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana dan kebijakan desa. Hal ini mendukung terciptanya manajemen yang lebih sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Karakteristik audit internal yang efektif antara lain independensi, kompetensi, dan berbasis risiko. Audit dengan karakteristik ini mampu meminimalisir penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan desa.

Beberapa indikator penting audit internal yang diperhatikan dalam penelitian ini meliputi kepatuhan terhadap peraturan, manajemen risiko, kualitas laporan keuangan, dan pengelolaan SDM. Indikator-indikator ini berkontribusi terhadap penguatan tata kelola desa.

Selain audit internal, kualitas sumber daya manusia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good village governance. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 22.772 dan nilai signifikansi 0.000, yang berarti bahwa kualitas SDM memiliki kontribusi besar dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang baik.

SDM desa yang berkualitas memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa berjalan secara efisien dan efektif. Ini penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

Indikator kualitas SDM yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Rahardjo, meliputi keterampilan, pendidikan, pengalaman kerja, dan karakter atau etika kerja.

Keterampilan individu mencakup kemampuan teknis dan non-teknis yang mendukung pekerjaan di pemerintahan desa, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah.

Pendidikan formal yang lebih tinggi diyakini memiliki korelasi dengan tingkat berpikir kritis, inovasi, dan produktivitas aparatur desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.

Pengalaman kerja yang relevan dianggap dapat meningkatkan adaptasi dan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan desa.

Karakter dan etika kerja juga memengaruhi suasana kerja dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur desa kepada masyarakat.

Uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal dan kualitas SDM secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap good village governance, dengan nilai F hitung sebesar 616.152 dan signifikansi 0.000.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.915 mengindikasikan bahwa sebesar 91,5% variasi good village governance dapat dijelaskan oleh variabel audit internal dan kualitas SDM.

Hal ini membuktikan bahwa kombinasi dari pengawasan yang baik dan pelaksana pemerintahan yang berkualitas sangat krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Audit internal menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal desa. Pelaksanaannya bukan hanya sebagai formalitas, tetapi menjadi bagian dari mekanisme perbaikan dan evaluasi kinerja.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai auditor internal harus dioptimalkan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan objektif.

BPD seharusnya diberdayakan lebih lanjut dalam hal pelatihan audit, agar dapat menjadi lembaga pengawas yang efektif dan independen.

Konsistensi audit internal juga mampu memperkuat transparansi dan mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang di desa.

Pemerintah desa perlu menerapkan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desanya, agar pemahaman mereka terhadap tata kelola keuangan dan administrasi terus meningkat.

Pelatihan yang dimaksud mencakup manajemen keuangan, perencanaan program, pelaporan keuangan, dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Dengan peningkatan kapasitas SDM desa, diharapkan mampu memperkuat sistem pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Kebijakan tata kelola yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Kualitas pelayanan publik di desa merupakan cerminan dari kompetensi dan kinerja perangkat desa dalam menjalankan amanahnya.

Penelitian ini juga mencatat bahwa implementasi prinsip good village governance belum maksimal di semua desa, karena keterbatasan dalam hal kompetensi SDM dan sistem pengawasan.

Adanya inkonsistensi pelaksanaan audit dan minimnya pelatihan bagi aparat desa menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan good village governance.

Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam melakukan pembinaan terhadap desa-desa, terutama dalam aspek penguatan SDM dan sistem pengawasan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan juga perlu didorong agar tercipta pemerintahan yang lebih partisipatif dan transparan.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa hanya akan tumbuh jika terdapat keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam jangka panjang, investasi pada penguatan kelembagaan audit internal dan pengembangan SDM akan memberikan dampak besar terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan.

Penting juga untuk mengadopsi teknologi informasi dalam proses tata kelola desa, guna mendukung transparansi dan efisiensi administrasi.

Integrasi sistem informasi akuntansi desa dengan sistem pengawasan internal dapat menjadi inovasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola desa.

Selain itu, perlu ada peraturan daerah atau kebijakan khusus yang mendukung penguatan kapasitas audit internal dan pelatihan perangkat desa.

Pemerintah desa juga didorong untuk memiliki rencana pembangunan jangka menengah yang terukur dan akuntabel, sesuai dengan prinsip good governance.

Perencanaan desa yang baik hanya bisa dicapai jika aparat desa memiliki kemampuan analisis, pengumpulan data, dan pemahaman kebijakan yang memadai.

Penelitian ini menyarankan agar peneliti selanjutnya memasukkan variabel tambahan seperti partisipasi masyarakat, kepemimpinan kepala desa, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan menambahkan variabel tersebut, pemahaman terhadap good village governance akan lebih komprehensif dan multidimensional.

Keterbatasan dalam penelitian ini diakui oleh penulis, terutama dalam hal cakupan variabel dan jumlah desa yang diteliti.

Namun demikian, hasil yang diperoleh memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang hubungan antara audit internal, kualitas SDM, dan tata kelola desa yang baik.

Penelitian ini juga memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan di tingkat lokal dan nasional terkait penguatan pemerintahan desa.

Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk bersama-sama membangun sistem pemerintahan desa yang kuat dan berintegritas.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa transformasi pemerintahan desa tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, tetapi harus ditunjang oleh kualitas pelaksana dan sistem pengawasan yang solid.

Perlu ada keberlanjutan dalam evaluasi kinerja aparatur desa agar dapat dilakukan perbaikan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan dinamika desa.

Hasil penelitian juga relevan dengan kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Jika diterapkan secara konsisten, audit internal dan peningkatan kualitas SDM dapat menjadi pilar utama dalam membangun desa yang mandiri dan maju.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan praktik good village governance yang berbasis pada pengawasan dan kompetensi aparatur desa.

Upaya perbaikan tata kelola desa tidak dapat ditunda, karena desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah didapat pada audit internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap perwujudan good village governance studi kasus pada desa se-Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar  $30.181 > 1.658$  dan nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Artinya, audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perwujudan good village governance.
2. Berdasarkan Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar  $22.772 > 1.658$  dan nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Dengan demikian, kualitas SDM juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perwujudan good village governance.
3. Berdasarkan Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar  $616.152$  dengan signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Ini menunjukkan bahwa audit internal dan kualitas SDM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap good village governance.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afryan Iriando Sipayung, Y., & Morasa, J. (2021). Evaluasi Audit Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Tomohon) Internal Audit Evaluation in Improving the Quality of Regional Financial Statements (Case Study on Tomohon City Inspectorate). *Emba*, 9(3), 871–879.

- Agoes, S. (2011). auditing (pemeriksaan akuntan) oleh kantor Akuntan Publik. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bramantyo, R. Y. (2022). Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa. *Transparansi Hukum*, 5(1), 152–167.
- Fahmi, A. (2011). Hal ini berarti bahwa kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit, sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki o. In עלון הנוטע (Vol. 66, Issue July).
- Fauzi, H., Neny Kusumadewi, R., Mulyani, H. S., & Prihartini, E. (2023). Pemberdayaan Pelaku Ukm Melalui Optimalisasi Pengetahuan, Pemahaman, Inovasi Dan Pengenalan Digitalisasi Menuju Desa Yang Kreatif. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4),
- Ndraha, Dewa Putu Agus Baruna. Pengaruh Budaya Organisasi, Kualitas Sdm, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Lpd Desa Adat Sibinggede Kabupaten Badung. Diss. Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2012.
- Helmayani, Putu Lia, et al. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Badan Permusyawaratan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Good Village Governance (Studi Pada Desa Di Kabupaten Buleleng)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 8.2.
- Heriyanto. (2015). sumber daya manusia desa memiliki pengaruh dalam pengelola keuangan desa, karena pengetahuan dan kemampuan perangkat desa tentang akuntansi masih sangat terbatas dan rendahS - tak cocok dengan artikel mana pun. *Governance*, 11(1), 51–62.
- I, kou at. (2017). Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Kelejan, R. A., Lengkong, V. P. ., & Tawas, H. N. (2018). Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Air Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(4), 1918–1927.
- Lengkong, Friesco Qeen, Maria H. Pratiknjo, and Very Y. Londa. "Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyidik pada Subdit II Harda Bangtah Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 2573-2587.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha per. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Oluseyi, Sri Adella. "Pengaruh Komitmen, SDM Nagari, Dan Laporan Keuangan Terhadap APBNag." *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi* 9.2 (2023): 29-39.
- Puspitasari, C., Sumarjono, Perdana, P., & Mardhika, J. G. (2022). Pola Relasi Pemerintahan Desa. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.149>
- Raharjo, Bakkah, H. Adi Nugroho, and W. Wahyu Winarno. "Analisis Faktor Determinan Penggunaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Implikasinya terhadap Reformasi Birokrasi pada BPK RI." *Jurnal Informatika* 10.1 (2010): 1149-1155.
- Sambodo, M. T. A. (2019). Determinan Efektivitas Audit Internal Di Sektor Publik. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Sawitri, Adriansah, Mattoasi Mattoasi, and Usman Usman. "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jambura Accounting Review* 3.: 89-101.
- Sugiyono. (2018). ... Kemampuan Berpikir Kreatif Antara Siswa yang Diajar dengan Model Pembelajaran Modified Free Inquiry (MFI) dan Guided Inquiry (GI) pada Konsep Pencemaran .... In Repository.Uinjkt.Ac.Id. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38996>
- Syam et al, Iswahyudi. "Penerapan good governance dalam pengelolaan dana desa selama pandemi covid 19." *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 7.1 : 43-57.
- Tugiman, Nurmalia Anggun, and Abdul Halim. "Peran audit internal dalam mewujudkan good

- corporate governance (studi pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Blitar)." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 4.1 (2016).
- Wowointana. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Pengawas Internal Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 5(1), 11–21.
- Zam Zam, R. Y., Kalangi, L., & Weku, P. (2021). Pengaruh Kompetensi, Etika, Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(4), 462–474.